

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Krisis yang melanda Indonesia pada pertengahan agustus 1998 sebenarnya sudah ada tanda-tanda penyebab sebelumnya. Hal ini dapat dilihat baik secara eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal penyebabnya adalah rentannya Indonesia dari pengaruh ekonomi di Asia. Sebagai contoh, krisis ekonomi yang dialami Indonesia dipengaruhi oleh negara Asia yaitu krisis mata uang yang terjadi di Thailand. Dengan melihat rentannya Indonesia terhadap hal tersebut sebenarnya dapat diperkirakan akan melanda beberapa negara di sekitarnya, termasuk Indonesia. Sedangkan dari sisi internal penyebab krisis ekonomi adalah yaitu melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar dan penurunan pendapatan per kapita yang dimana pada saat itu pertumbuhan ekonomi Indonesia -13 persen.<sup>1</sup> Sentralisasi kekuasaan, seperti penguasaan ekonomi oleh elit penguasa seperti industrialisasi, korupsi, kolusi.

Untuk mengatasi krisis ekonomi Indonesia, *International Monetary Fund* (IMF) di undang masuk ke Indonesia. IMF memiliki dasar kebijakan yang selalu menjadi syarat ketika ingin diberikannya bantuan. Kebijakan tersebut yang pertama adalah *strucural adjustment policy*. Kebijakan ini digunakan untuk mengatasi masalah darurat neraca pembayaran. Masalah darurat yang dimaksud adalah

---

<sup>1</sup> *Okezone*. 2018. "Boediono Mengenang Krisis Ekonomi 1998: Kita Paling parah Saat Itu". 28 Maret. Tersedia Online Melalui: <https://economy.okezone.com/read/2018/03/28/20/1879132/boediono-mengenang-krisis-ekonomi-1998-kita-paling-parah-saat-itu>, diakses 21 Oktober 2018.

terjadinya defisit transaksi berjalan seperti yang dialami Indonesia pada tahun 1997, yaitu defisit transaksi berjalan yang menahun dan turunnya nilai mata uang secara drastis. Kebijakan yang kedua adalah restrukturisasi atau penataan kembali perekonomian yang beraliran neoliberal. Kebijakan ini berisi kebijakan deregulasi yang mendukung ekonomi pasar secara luas.<sup>2</sup>

Kebijakan ekonomi dari IMF berdampak langsung terhadap perubahan masyarakat di Indonesia baik positif maupun negatif. Hal ini sesuai dengan adanya dua pandangan terhadap teori ketergantungan yang telah dijelaskan oleh Sztompka, yaitu pandangan yang bersifat pesimis dan pandangan yang bersifat optimis. Gejala perubahan sosial yang timbul sebagai akibat dari kedua teori ketergantungan tersebut dapat dilihat dari bidang politik dan ekonomi yang di dalamnya mencakup salah satu program yang dipaksakan oleh IMF kepada Indonesia yaitu program privatisasi. Sistem ini menetapkan peran negara di bidang ekonomi hanya terbatas pada pengawasan pelaku ekonomi dan penegakan hukum. Privatisasi menerangkan bahwa jika sektor publik dibebaskan dalam melakukan usaha, investasi dan inovasi, maka pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat akan meningkat. Namun pada kenyataannya privatisasi merupakan cara IMF untuk melemahkan negara berkembang yang kaya akan sumber daya alam dengan cara menjual aset-aset negara tersebut. Cara lainnya adalah dengan mengurangi bahkan mencabut sama sekali subsidi baik pada BBM, listrik, pendidikan, sampai kesehatan. Alasan yang banyak digunakan pemerintah sebagai alasan pemerintah atas dijualnya BUMN adalah karena tidak

---

<sup>2</sup> Revisond Baswir, Deddy Heriyanto dan Rinto Andriyono, 2003. *Terjajah Di Negeri Sendiri*. Jakarta: Elsam. hlm 415.

efisien dan terjadi kebocoran-kebocoran dalam sebuah BUMN sehingga perlu untuk di privatisasi.<sup>3</sup>

Di era pemerintahan Presiden Baharuddin Jusuf Habibie, IMF sempat menunda dana bantuan karena terjadi kekerasan militer di Timor Leste, dan berbagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang dilakukan Tentara Nasional Indonesia (TNI).<sup>4</sup> Selama Habibie menjabat menjadi presiden banyak tekanan dari dalam negeri, Habibie juga harus berhadapan dengan intervensi ekonomi yang dipaksakan oleh IMF. Lembaga moneter ini memaksa Indonesia agar menghapus kebijakan subsidi, terutama BBM dan TDL (Tarif Dasar Listrik). Namun, hal itu justru ditolak, dengan begitu Habibie pun membentuk lembaga pengawas dan penyelesaian masalah untuk utang luar negeri, dan mengimplementasikan reformasi ekonomi yang disyaratkan oleh IMF. Untuk mendukung seluruh kebijakannya, Habibie mengesahkan UU No. 5 tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat dan UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Menurut analisis *Millenium* penata *Futures*, Suluh Adil Wicaksono, upaya ini cukup berhasil karena Habibie tidak menganut sistem pasar bebas.<sup>5</sup> Selama 16 bulan beliau menjadi presiden, tidak ada perusahaan yang di privatisasi di

---

<sup>3</sup> Siti Khadijah. 2014. "IMF Dalam Perspektif Teori Dependensi dan Perubahan Sosial". *Jurnal Makna*. Vol 4. No. 1. hal 13-14.

<sup>4</sup> Lavinda. 2018. "Memorabilia IMF dari era Soeharto hingga Jokowi." *CNN Indonesia*, 5 Oktober. Tersedia Online Melalui: <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20181001180924-532-334733/memorabilia-imf-dari-era-soeharto-hingga-jokowi>, diakses 28 Oktober 2018.

<sup>5</sup> Yulistyo Pratomo. 2015. "Sepak terjang Habibie mampu turunkan harga dollar hingga Rp 6.500." *Merdeka*, 26 Agustus. Tersedia Online melalui: <https://www.merdeka.com/peristiwa/sepak-terjang-habibie-mampu-turunkan-harga-dollar-hingga-rp-6500.html>, diakses pada 28 Oktober 2018.

Indonesia. Pada era Presiden selanjutnya yaitu KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur IMF kembali menunda bantuan dana kepada Indonesia karena Gus Dur tidak mengikuti kebijakan dari IMF seperti yang dikatakan Rizal Ramli bahwa ketika di pemerintahan Gus Dur keadaan ekonomi minus 3 persen. Setelah itu pemerintah memutuskan untuk tidak mengikuti kebijakan IMF. Selain itu, lanjut Rizal, di era Gus Dur adalah satu-satunya pemerintahan yang berhasil mengurangi indeks kesenjangan ekonomi, tidak melakukan impor beras selama kurun waktu dua tahun dengan tetap menjaga kestabilan harga.<sup>6</sup>

Pada 23 juli 2001 Megawati Soekarno Putri menggantikan Gus Dur sebagai presiden dan setelah sebulan dilantik Megawati mengulang kembali kesepakatan dengan IMF untuk memulai lagi pinjaman sebesar \$5 miliar.<sup>7</sup> Berdasarkan data dan fakta yang terjadi, pada periode pemerintahan 2001-2004 pada era pemerintahan Megawati merupakan pemerintahan yang menganut sistem neoliberalisme karena pemerintahannya sangat mengandalkan privatisasi BUMN. Saham-saham perusahaan yang diambil alih pemerintahan sebagai kompensasi pengembalian kredit BLBI, juga dijual dengan sangat murah, hanya sekira 20 persen dari total nilai BLBI. BLBI adalah skema bantuan yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan

---

<sup>6</sup> Idham Anhari. 2017. "Rizal Ramli: Satu-satunya pemerintahan yang kurangi hutang hanya era Gus Dur" . *Rmol*, 30 November. Tersedia Online melalui: <https://politik.rmol.co/read/2017/11/30/316507/Rizal-Ramli:-Satu-satunya-Pemerintahan-Yang-Kurangi-Utang-Hanya-Era-Gus-Dur->, diakses pada 28 Oktober 2018.

<sup>7</sup> Winda Jusuf. 2017. "Kilas balik Indonesia-IMF selama krisis ekonomi Asia". *Tirto*, 20 Juli. Tersedia Online Melalui: <https://tirto.id/kilas-balik-indonesia-imf-selama-krisis-ekonomi-asia-cs6f>, diakses pada 28 Oktober 2018.

berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis. BUMN yang dijual seperti PT Indosat, PT Aneka Tambang, dan PT Timah dan lain-lain diprivatisasi. Selama tiga tahun pemerintahan periode ini terjadi privatisasi BUMN dengan nilai sebesar Rp 3,5 triliun pada tahun 2001, Rp 7,7 triliun pada 2002 dan Rp 7,3 triliun pada tahun 2003.<sup>8</sup>

Harapan rakyat atas terjadinya perubahan ekonomi yang lebih pro-rakyat daripada pro-pasar ada ditangan SBY-Kalla yang dipilih langsung oleh rakyat. Tapi hal tersebut tidak terwujud. Pemilihan tim ekonomi Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) ternyata di isi oleh orang-orang yang mendukung privatisasi dan menajalankan kebijakan tersebut seperti kebijakan yang telah dibuat oleh para menteri ekonomi yang mengusung prinsip privatisasi yang pada saat itu dijabat oleh Jusuf Anwar dan di gantikan oleh Sri Mulyani ketika mekanisme *reshuffle* kabinet. Setelah itu ada menteri BUMN Sugiharto dan di dukung Aburizal Bakrie sebagai menteri koordinator bidang perekonomian yang melakukan privatisasi dengan dalih untuk memenuhi target pendapatan APBN tahun 2005, meskipun kebijakan privatisasi ini mendapat tantangan yang keras dari Wakil Presiden Yusuf Kalla.<sup>9</sup>

Pergantian KIB jilid satu dan dua yang dilakukan Presiden SBY-Kalla ternyata tidak mampu menggeser peranan pemerintahan yang cenderung lebih Pro-pasar dari

---

<sup>8</sup> Muhammad saifullah. 2009. "Privatisasi di era Megawati karena krisis ekonomi". *Okezone*, 30 Mei. Tersedia Online Melalui: <https://news.okezone.com/read/2009/05/30/268/224502/privatisasi-di-era-megawati-karena-krisis-ekonomi>, diakses pada 28 Oktober 2018.

<sup>9</sup> Aly Yusuf. 2005. "Evaluasi pemerintahan Sby-Kalla". *Media Neliti*, Juni. Tersedia Online Melalui: <https://media.neliti.com/media/publications/45117-ID-evaluasi-pemerintahan-sby-kalla.pdf>, diakses pada 28 Oktober 2018.

pada Pro-Rakyat. Tidak mengherankan, jika kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh SBY-Kalla sejak awal pemerintahannya justru menunjukkan semua kebijakan ekonomi dari *Washington Consensus*. Hal ini terlihat dari penggunaan instrumen kebijakan ekonomi yang menganut faham Neoliberal seperti deregulasi, liberalisasi, privatisasi dan penghapusan subsidi. Liberalisasi dilakukan secara konsisten hampir di semua sektor perekonomian Indonesia.<sup>10</sup>

Dilihat dari kekuatan politik yang ada dalam kabinet SBY-Kalla, komposisi kabinet yang terbentuk ini sangat kuat dan mengarah pada preferensi kebijakan Neoliberal dengan disahkannya UU penanaman modal pada maret 2007.<sup>11</sup> SBY oleh para aktivis ormas petani dan *nongovernment organizations* (NGOs) dikenal sebagai seorang pemimpin politik yang cenderung suka bekerjasama dengan kekuatan kapitalisme global dan tidak memiliki ikatan-ikatan yang kuat dengan mereka.<sup>12</sup> Privatisasi di jaman SBY amat masif, dan tentunya akan memperlemah struktur kekayaan negara karena privatisasi ini disertai dengan sistem politik neoliberal dimana pemodal masuk dan menguasai seluruh kekayaan negara sementara negara sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk bersaing dengan pemodal-pemodal asing. Ketiga hal ini bisa menjelaskan kenapa SBY membenarkan politik utang dan politik liberalisasi.<sup>13</sup> Pada periode tahun

---

<sup>10</sup> Fahmi Radhi. 2008. *Kebijakan Ekonomi Pro Rakyat*. Jakarta: Republika. Hal 8.

<sup>11</sup> Ibid, hal 10.

<sup>12</sup> Sunardi Purwaatmoko. 2015. "Pengaruh Perubahan Pola Koalisi Antar Parpol Terhadap Proses Pembuatan Kebijakan Sektor Perberasan". *Jurnal Insignia*. Vol. 2. No. 1. Hal 69.

<sup>13</sup> Farid dan Putu Heri. 2014. "Lomba privatisasi BUMN, siapa menang". *Liputanislam*, 4 September. Tersedia Online melalui: <http://liputanislam.com/opini/lomba-privatisasi-bumn-siapa-menang/>, diakses pada 11 Oktober 2018.

1991-2001, pemerintah Indonesia telah 14 kali memprivatisasi BUMN, namun yang berhasil diprivatisasi ada 11 BUMN. Sementara di pemerintahan SBY, dalam setahun terdapat 44 BUMN yang langsung dijual kepada pihak asing. Dengan agresifitasnya dalam mengobrol BUMN, privatisasi hanya menjadi mekanisme transfer kekayaan dari tangan publik kepada segelintir swasta, juga sebagai skema penghancuran ekonomi nasional yang potensial oleh negeri-negeri imperialis.<sup>14</sup> Salah satu contoh BUMN yang telah di privatisasi adalah PT Krakatau Steel.

Kebijakan privatisasi yang telah dilakukan oleh pemerintahan SBY-kalla dan IMF membuat kekayaan Indonesia dikuasai oleh pihak asing dan oleh sebab itu menyebabkan minimnya kemandirian dari ekonomi Indonesia, dengan sistem ekonomi neoliberal ini membuat bangsa tidak bisa lepas dari hutang luar negeri. Di masa pemerintahannya SBY pun tidak ada solusi untuk menghapus hutang terdahulu yang di emban Indonesia sehingga masyarakat pun turut serta menanggung beban utang yang dibuat oleh pemimpin di negeri ini, selain itu Presiden SBY mendapat julukan 'Bapak Privatisasi' karena kebijakan yang ia lakukan bersama IMF sehingga SBY pun hanya bisa tunduk dan mengikuti instruksi langsung dari IMF. Organisasi tersebut ingin membuat bangsa ini kembali ke zaman kekuasaan modal oleh kolonial yang dimana hal tersebut sudah dimusnahkan oleh Presiden RI pertama Soekarno. Neoliberal menjadi jalan ekonomi yang ditempuh pada masa pemerintahan SBY-Kalla ditambah dengan dilegalkan nya undang undang nomer 15 tahun 2007 tentang penanaman modal asing seolah menjadi akses kunci kepada pihak asing untuk menguasai BUMN dan melakukan

---

<sup>14</sup> *BerdikariOnline*. 2010."SBY bapak privatisasi Indonesia". 4 November. Tersedia Online Melalui: <http://www.berdikarionline.com/sby-bapak-privatisasi-indonesia/>, diakses Pada 14 Oktober 2018

privatisasi di Indonesia dengan berdasar apa yang sudah di rencanakan IMF dan SBY. Pada tahun 2006 SBY menyatakan bahwa hutang sudah dilunasi kepada IMF dan seharusnya jatuh tempo pada tahun 2010, SBY beralih bahwa pada saat itu perekonomian di Indonesia membaik dan memutuskan bersama pemerintah dan Bank Indonesia untuk mempercepat pelunasan hutang sekaligus mengurangi biaya penalti utang karena telah mempercepat proses pelunasan hutang ke IMF.<sup>15</sup>

Setelah proses pelunasan utang tidak membuat privatisasi di Indonesia berhenti dan masih tetap menutupi utang negara dengan menjual BUMN. Privatisasi tetap dilakukan ketika tahun 2008. Sekitar 37 BUMN yang diprivatisasi oleh pemerintah untuk mendorong pemasukan negara dan demi menutupi jumlah hutang yang sangat besar dan BUMN yang diprivatisasi itu antara lain Kawasan Industri Medan, Kawasan Industri Makassar, Kawasan Industri Wijaya Kusuma, Bank Negara Indonesia (BNI) Persero, Adhi Karya, PT Asuransi Jasa Indonesia, BTN, Jakarta Lloyd, Krakatau Steel, Industri Sandang, PT Inti, Rukindo, dan Bahtera Adi Guna, PT Perkebunan Nusantara III, PT Perkebunan Nusantara IV, PT Perkebunan Nusantara VII, dan Sarana Karya, Semen Batu Raya, Waskita Karya, Sucofindo, *Surveyor* Indonesia, Kawasan Berikat Nusantara, Pembangunan Perumahan (melalui IPO), Kawasan Industri Surabaya, dan Rekayasa Industri. Yodya Karya, Kimia Farma dan Indo Farma (keduanya mau merger), PT Kraft Aceh, PT Dirgantara Industri, Boma Vista, PT Barata, PT Inka, Dok Perkapalan Surabaya, Dok Perkapalan Koja Bahari, Biramaya Karya, dan Industri Kapal Indonesia. Pada

---

<sup>15</sup> Ghoida Rahmah dan Ali Akhmad Noor Hidayat. 2018. "IMF Ingatkan Pemerintah soal Tekanan Defisit Transaksi Berjalan". *Tempo*, 13 Oktober. Tersedia Online Melalui: <https://bisnis.tempo.co/read/1135771/imf-ingatkan-pemerintah-soal-tekanan-defisit-transaksi-berjalan>, diakses pada 14 Oktober 2018.

tahun 2009 BUMN yang sudah masuk program privatisasi sekitar 20 BUMN. Sembilan BUMN menggunakan pola penjualan saham kepada publik (IPO) yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Waskita Karya, PT Bank Tabungan Negara (BTN), PT Krakatau Steel, PTPN III, PT PN IV, PTPN VII, PT Asuransi Jasa Indonesia, dan PT Rekayasa Industri. Tujuh perusahaan dijual dilakukan dengan pola penjualan strategis yaitu PT Rukindo, PT Bahtera Adiguna, PT Industri Sandang, PT Sarana Karya, PT Cambrics Primissima, PT Industri Gelas, PT BNI Tbk, Semen Kupang, Semen Baturaja dan privatisasi tiga BUMN Konstruksi, PT Adhi Karya, PT Pembangunan Perumahan dan PT Waskita Karya.<sup>16</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka timbul pertanyaan untuk memecahkan masalah dengan lebih jelas sesuai acuan pedoman yang akan di paparkan secara sistematis dan faktual. Berikut pertanyaan yang muncul setelah pemaparan diatas:

Mengapa pemerintahan SBY-Kalla mengambil kebijakan privatisasi BUMN secara besar-besaran? Siapa yang diuntungkan dari penjualan BUMN tersebut?

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Hutang Luar Negeri**

Hutang luar negeri merupakan sebagian dari keseluruhan utang negara yang didapat dari para kreditor di luar negara yang bersangkutan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau

---

<sup>16</sup> M.Syafi'ie. 2016. "Sistemiknya privatisasi Badan usaha Milik Negara dan Sumber Daya Alam di Indonesia". *Mahkamah*. Volume 1, No 1, 2016. Hal 71-72.

lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia. Menurut pandangan tradisional atas utang pemerintah, pemotongan pajak yang didanai oleh utang mendorong pengeluaran konsumen dan mengurangi tabungan nasional.<sup>17</sup> Utang pemerintah berpotensi memiliki berbagai dampak tambahan dari utang pemerintah atau defisit anggaran yang besar dapat mendorong ekspansi moneter yang berlebihan dan karena itu menyebabkan pemerintah SBY harus melakukan privatisasi untuk membayar utang negara ke IMF.

## 2. Neoliberalisme

Neoliberalisme yang digagas pertama kali di Jerman pada 1932 adalah sebuah upaya pembaruan terhadap ajaran ekonomi pasar liberal sebagaimana diperkenalkan oleh Adam Smith pada tahun 1776. Dalam buku *The wealth of Nations* Smith memperkenalkan ajaran ekonomi pasar liberal yang mempercayai kecanggihan sistem ekonomi pasar dibandingkan dengan sistem-sistem ekonomi yang lain. Menurut Smith, dalam sistem ekonomi pasar tersebut terdapat tangan gaib (*invisible hand*) yang mempunyai kuasa untuk mengatur keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Dalam Neoliberalisme pun campur tangan negara dalam sebuah sistem ekonomi pasar bebas tidak diperlukan dan beranggapan bahwa seharusnya dalam perdagangan bebas, kebijakan ekonomi, maupun globalisme tidak ada intervensi dari pemerintah dan privatisasi sebagai

---

<sup>17</sup> Made Santana Putra Adiyadya. 2017. "Analisis pengaruh inflasi, kurs dolar Amerika, suku bunga kredit, dan utang luar negeri terhadap cadangan devisa Indonesia tahun 1996-2015. *Jurnal Riset Akuntansi*. Vol. 7. No. 1. Hal 72.

suatu aktifitas ekonomi yang mempunyai tujuan untuk menertibkan ekonomi pasar.<sup>18</sup>

Peran sebuah negara dalam sistem neoliberalisme dibatasi hanya sebagai pengatur mekanisme pasar. Dalam perkembangan selanjutnya, terutama setelah di bawa ke Chicago dan pada akhir 1900-an dikemas menjadi sebuah paket kebijakan ekonomi yang dikenal dengan *Washington consensus*, peran negara dalam ekonomi sistem neoliberal ditekankan untuk melakukan 4 hal diantaranya (1) penghapusan subsidi; (2) liberalisasi sektor keuangan; (3) liberalisasi perdagangan dan (4) Privatisasi.<sup>19</sup>

Pemerintahan SBY-Kalla merujuk kepada kebijakan ekonomi dari *Washington Consensus* yaitu pengurangan subsidi terhadap BBM pada awal pemerintahan SBY dan melakukan privatisasi terhadap BUMN yang membuktikan bahwa kebijakan ekonomi SBY-Kalla berorientasi kepada pasar dan mengurangi peran negara dalam sistem mekanisme pasar. Selain itu penerapan kebijakan ekonomi dari IMF yang merupakan bagian dari sistem neoliberal menjauhkan peran negara untuk memaksa melepaskan kekuasaan terhadap sumber-sumber ekonomi. Selain itu neoliberalisme ini memaksa agar negara tidak terlibat dalam memproteksi terhadap berjalannya hukum pasar, liberalisasi di era pemerintah SBY pun terlihat ketika disahkannya UU nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal yang memperkuat bahwa kebijakan ekonomi di era pemerintahan SBY ini memuat konsep neoliberalisme.

Privatisasi dan kebijakan neoliberal merupakan salah satu kunci dari sistem ekonomi globalisasi. Diantara ciri-ciri kebijakan neoliberal itu adalah: pertama, paket kebijakan untuk melakukan deregulasi dan mengurangi atau

---

<sup>18</sup> Imam Santosa. 2010. "Ekonomi kerakyatan dan Neoliberalisme". *Jurnal Magistra*. No 74. Hal 91.

<sup>19</sup> Op.cit

menghilangkan hambatan terhadap bekerjanya korporasi meskipun harus mengorbankan rakyat. Kedua, kebijakan mengintegrasikan dan mengkonversikan ekonomi nasional ke dalam ekonomi yang berorientasi ekspor meskipun kebijakan tersebut harus mengorbankan lingkungan dan sistem sosial. Ketiga, kebijakan yang mendorong pertumbuhan ekonomi untuk tumbuh super cepat meskipun harus dengan mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mengenal batas. Keempat, kebijakan yang mendukung peningkatan konsentrasi korporasi secara dramatis. Kelima, kebijakan yang memangkas semua program pelayanan sosial, pelayanan kesehatan maupun perlindungan lingkungan. Keenam, kebijakan yang menggeser kekuasaan tradisional ataupun kebijakan yang melemahkan institusi demokratis pemerintah maupun komunitas lokal dan menggantikannya dengan birokrat korporasi global. Ketujuh, kebijakan mendorong homogenitas budaya global dan kebijakan yang mendorong atau mempromosikan budaya konsumtif secara intensif. Akhirnya, ciri khusus dari kebijakan neoliberal adalah kebijakan privatisasi dan komersialisasi atas layanan publik, sumber daya alam yang seharusnya milik rakyat seperti air, udara dan keanekaragaman hayati tetapi hal tersebut dijual kepada asing.<sup>20</sup>

Dari ciri-ciri kebijakan neoliberal di atas, pemerintahan SBY demi pertumbuhan ekonomi melakukan eksploitasi alam dengan menerapkan kebijakan privatisasi di era pemerintahannya, melalui kebijakan privatisasi tersebut terlihat jelas bahwa peran negara di pemerintahan SBY tidak dapat melaksanakan apa yang dituliskan di konstitusi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tetapi SBY justru melakukan kebijakan privatisasi dengan dukungan politisi di kabinetnya sebagai cara untuk menaikkan pertumbuhan

---

<sup>20</sup> Etty soesilowati. 2009. "Neoliberalisme: Antara Mitos Dan Harapan". *Jejak*. Volume 2, No 2, 2009. Hal 129.

ekonomi dengan orang-orang yang diuntungkan atas kebijakan privatisasi tersebut.

Penyebaran neoliberalisme tidak lepas dari peran perusahaan transnasional (TNCs) yang membuat transaksi perdagangan barang, jasa, surat-surat berharga dan mata uang antar negara menjadi terbuka dan makin intensif. Terlepas dari berbagai perdebatan pro dan kontra mengenai TNCs yang kehadirannya dalam melakukan relokasi industri (dari negara maju ke negara berkembang), standarisasi teknologi (melalui transfer teknologi), dan penciptaan lapangan kerja di negara-negara berkembang telah membuat hampir seluruh negara didunia bisa untuk menolak kiprah TNCs.<sup>21</sup>

#### **D. Hipotesa**

Pemerintahan SBY mengambil kebijakan privatisasi karena: (i) Untuk membayar hutang ke IMF, (ii) Mengikuti paket kebijakan ekonomi yang dibuat IMF, (iii) Mendapat dukungan dari orang-orang yang ada di kabinet Indonesia Bersatu. Selain itu keuntungan yang diperoleh komisaris BUMN, investor asing, dan menteri teknokrat.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai cara untuk menjelaskan data-data yang di dapat berupa tulisan ilmiah dan pemaparan laporan serta tindakan yang tergambar di dalam hasil penelitian. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang dipakai adalah tipe representasi sejarah, yang mengacu kepada data berupa fakta-fakta sejarah. Temuan data berupa kepingan-kepingan yang terpisah tersebut akan dirunut berdasarkan waktu, sehingga

---

<sup>21</sup> Bob Sugeng Hadiwinata. 2006. "Bourdieu, Neoliberalisme, Intelektual dan Gerakan Sosial Global". *Jurnal Melintas*. Vol. 22. No. 1. Hal 477- 478.

menjadi pengetahuan yang sesuai dengan fenomena yang terjadi di masa lampau. Beberapa langkah yang dilakukan dalam metode penelitian ini adalah:

1. Mengkonseptualisasikan objek penelitian.
2. Menemukan bukti sejarah.
3. Mengevaluasi kualitas dari bukti sejarah.
4. Menyusun bukti sejarah yang ditemukan.
5. Mensintesis hasil temuan data.
6. Menulis laporan.<sup>22</sup>

Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah data dari bahan sekunder dan studi kepustakaan yakni pada tahapan ini peneliti bukan kegiatan yang bersifat '*trial-error*'. Studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, seperti:

1. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
2. Mendapatkan metode, teknik atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan.
3. Sebagai sumber data sekunder.
4. Mengetahui *historis* dan perspektif dari permasalahan penelitiannya.
5. Mendapatkan informasi tentang cara evaluasi atau analisis data yang dapat digunakan.
6. Memperkaya ide-ide baru.
7. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa pemakai hasilnya.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Neuman W. Lawrence. *Social Research methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (Boston: Allyn and Bacon, 1997). Hal 381.

<sup>23</sup> Rudy Hartanto. 2003. *Metodologi Penelitian*. Semarang: Upt-Pustak-Undip. Hal 4.

## **F. Manfaat dan Tujuan Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi kebijakan-kebijakan privatisasi yang dilakukan SBY dan pengambilan kekayaan dengan jumlah sangat besar yang dikuasai asing dari privatisasi. Serta bermanfaat untuk mengetahui kenapa SBY-Kalla melakukan privatisasi yang membuat perusahaan negara menjadi milik asing.

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab hipotesa dari pemerintahan SBY dengan menerapkan kebijakan privatisasi dalam sistem ekonomi yang merupakan bagian dari neoliberalisme yang dikemas oleh IMF sebagai paket kebijakan ekonomi SBY selama periode pemerintahannya yaitu 2004-2009 dan menjelaskan pihak yang diuntungkan dari penerapan sistem privatisasi selama pemerintahannya tersebut.

## **G. Jangkauan Penelitian**

Penelitian ini dipilih berdasarkan pemerintahan SBY yang berlangsung selama 1 periode yaitu 2004-2009 agar pembahasan tidak menyimpang dan mempersempit pembahasan sehingga lebih jelas, dan lengkap ketika diteliti dan dirangkum. Karena rentan waktu awal pemerintahan SBY-Kalla sangat menarik untuk dibahas karena beberapa tahun kebelakang sebelum beliau memimpin pemilu dilakukan tidak dengan pemilu dan masyarakat sangat berharap akan perubahan ekonomi pasca krisis yang terjadi di Indonesia ketika SBY-Kalla memimpin negeri ini. Kerjasama yang terjadi dengan organisasi Internasional yaitu IMF dan pelunasan hutang kepada IMF dan privatisasi yang dilakukan SBY serta ikut campur IMF dalam hal tersebut.

## **H. Sistematika Penulisan**

Bab pertama dari penelitian ini adalah pendahuluan yang berisi: Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Tujuan dan Manfaat Penelitian.

Bab kedua yaitu Kebijakan ekonomi pasar sebelum masa pemerintahan SBY-Kalla. Menjelaskan kebijakan ekonomi pasar dan kebijakan privatisasi dari era soeharto sampai era pemerintahan sebelum SBY-Kalla.

Bab ketiga yaitu Kebijakan privatisasi SBY-Kalla. Menjelaskan kebijakan privatisasi yang diterapkan SBY serta pengesahan undang-undang tentang privatisasi di kebijakan ekonominya.

Bab keempat yaitu kebijakan privatisasi SBY dan pihak yang diuntungkan dari privatisasi. Menjelaskan kebijakan privatisasi yang diterapkan oleh SBY dan pihak atau kelompok yang diuntungkan dari kebijakan privatisasi.

Bab kelima yaitu kesimpulan yang berisi rangkuman dari seluruh penelitian.